

Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan Kepada Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan

Maret 2026



BANK INDONESIA

SBDK Januari 2026 menurun, dikontribusikan oleh penurunan biaya dana dan biaya overhead.

- ***SBDK Januari 2026 menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dikontribusikan oleh penurunan biaya dana dan biaya overhead sehingga memberikan ruang bagi perbankan untuk meningkatkan margin keuntungan dan memperbaiki kinerja profitabilitas.***
- ***Suku bunga kredit Rupiah secara agregat tercatat relatif stabil pada Februari 2026, meskipun suku bunga kredit baru mengalami kenaikan yang mencerminkan penyesuaian persepsi risiko perbankan dalam penetapan pricing kredit.***
- ***Suku bunga kredit pada mayoritas sektor prioritas KLM mengalami penurunan dalam enam bulan terakhir di tengah risiko kredit yang tetap terjaga, serta berada pada level yang lebih rendah dibandingkan rata-rata industri.***

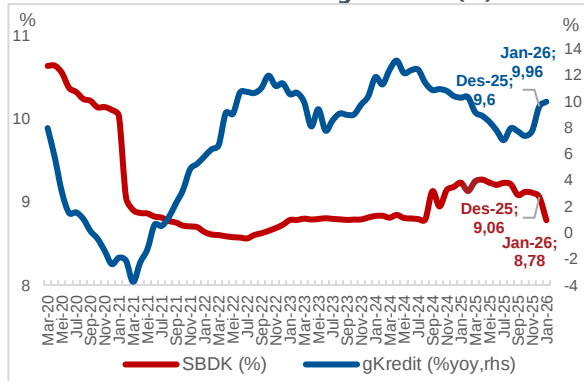
Perkembangan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)¹ Januari 2026

SBDK Januari 2026 tercatat menurun dipengaruhi oleh likuiditas perbankan yang membaik yang mendorong penurunan biaya dana. Secara bulanan, SBDK turun cukup signifikan sebesar 28 *basis points* (bps) menjadi sebesar 8,78%. Penurunan SBDK terjadi di tengah penguatan kinerja pertumbuhan kredit perbankan sebesar 36 bps secara bulanan menjadi 9,96% (yoy) pada Januari 2026 (**Grafik 1**).² Dinamika tersebut mencerminkan pergerakan suku bunga kredit yang semakin kompetitif untuk mendukung perbaikan permintaan pembiayaan dan mendorong kinerja intermediasi perbankan. Berdasarkan kelompok bank, penurunan SBDK terutama dikontribusikan oleh kelompok BPD dan BUMN yang masing-masing mencatatkan penurunan sebesar 82 bps dan 43 bps menjadi 9,14% dan 8,97% (**Grafik 2**). Sementara itu, kelompok BUSN tercatat mengalami penurunan terbatas sebesar 1 bps menjadi 8,58%. Kelompok KCBA mengalami peningkatan sebesar 16 bps menjadi 5,15%. Perbedaan ini mengindikasikan adanya perbedaan respons antar kelompok bank yang dipengaruhi oleh kondisi likuiditas, strategi penyaluran kredit, serta profil risiko yang dihadapi masing-masing kelompok bank. Ke depan, perkembangan tersebut diharapkan dapat memperkuat transmisi penurunan suku bunga kebijakan ke suku bunga dasar kredit.

¹ SBDK merupakan suku bunga dasar kredit yang dipublikasikan oleh bank sesuai dengan Peraturan OJK No.13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Kredit. SBDK digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan pada nasabah, namun belum mencakup premi risiko yang dapat bervariasi untuk setiap debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur secara umum tidak sama dengan SBDK. Periode asesmen menggunakan data SBDK yang tersedia hingga publikasi laporan.

² Sejak Oktober 2024, komponen pembentuk SBDK mengalami perubahan dan penyesuaian sejalan dengan pengaturan dalam POJK No.13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit. Lebih lanjut, angka SBDK Oktober 2024, November 2024 dan Desember 2024 disajikan ulang sejalan dengan koreksi data yang disampaikan bank pelapor pada periode dimaksud.

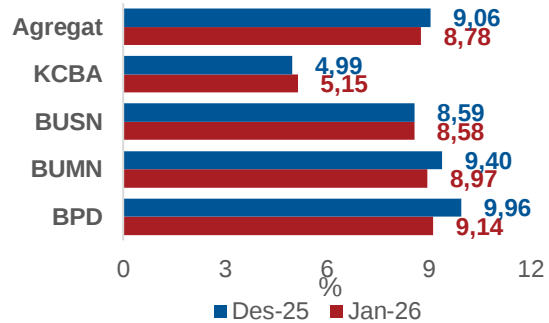
Grafik 1. Perkembangan SBDK (%)



*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank

Sumber: OJK (diolah)

Grafik 2. SBDK Januari 2026*
Berdasarkan Kelompok Bank (%)



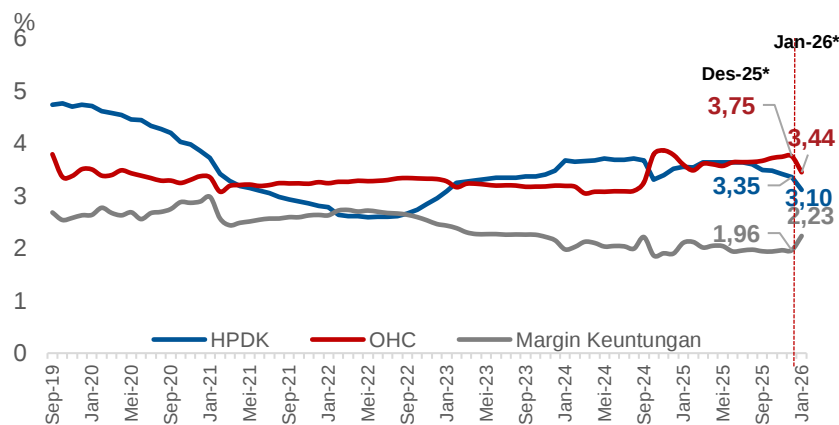
*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank

Sumber: OJK (diolah)

Perkembangan Komponen SBDK³

Penurunan SBDK terutama didorong oleh berlanjutnya penurunan biaya dana (HPDK) dan biaya overhead (OHC), yang memberikan ruang bagi perbankan untuk meningkatkan margin keuntungan. Secara bulanan, biaya dana atau Harga Pokok Dana Untuk Kredit (HPDK) kembali menurun sebesar 15 bps menjadi 3,10% pada Januari 2026 (**Grafik 3**). Hal ini mencerminkan meredanya tekanan biaya pendanaan seiring dengan perbaikan kondisi likuiditas perbankan. Biaya overhead (Overhead Cost atau OHC) juga mencatatkan penurunan yang signifikan sebesar 31 bps menjadi 3,44%, terutama dipengaruhi oleh penurunan beban promosi, iklan, dan beban lainnya. Perkembangan tersebut memberikan ruang bagi perbankan untuk memperbaiki kinerja profitabilitas, yang tecermin dari kenaikan margin keuntungan sebesar 27 bps menjadi 2,23%.

Grafik 3. Perkembangan Komponen Pembentuk SBDK* (%)



*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.

Sumber: OJK (diolah)

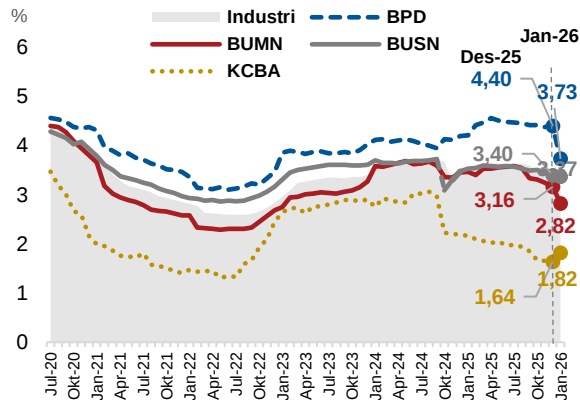
³ SBDK terdiri dari tiga komponen pembentuk, yaitu (i) Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang terdiri dari DPK (Biaya DPK, biaya giro wajib minimum, biaya premi LPS) dan Biaya non-DPK (Biaya dana liabilitas kepada Bank Indonesia dan bank lain, Biaya surat-surat berharga yang diterbitkan, Biaya dana pinjaman yang diterima, dan lainnya); (ii) Biaya overhead (OHC) yang terdiri dari Perubahan nilai wajar liabilitas, Kerugian risiko operasional, Komisi/provisi/fee dan administrasi, Penyusutan/amortisasi, kerugian penurunan nilai aset non-keuangan, Beban tenaga kerja, Beban promosi, Kerugian penjabaran transaksi valas, Beban lainnya, Biaya overhead lainnya; (iii) Margin keuntungan, yang ditetapkan oleh bank dalam penyaluran kredit.

HPDK tercatat menurun pada Januari 2026 seiring dengan perbaikan kondisi pendanaan perbankan. Berdasarkan kelompok bank, penurunan HPDK terutama terjadi pada kelompok BPD dan BUMN mengalami penurunan cukup signifikan masing-masing sebesar 67 bps dan 34 bps menjadi 3,73% dan 2,82%, sekaligus mencatatkan level HPDK terendah pascapandemi Covid-19 (**Grafik 4**). Sementara itu, penurunan HPDK pada kelompok BUSN tercatat lebih landai yakni sebesar 3 bps menjadi 3,37%, sedangkan kelompok KCBA tercatat meningkat sebesar 18 bps menjadi 1,82%. Penurunan HPDK industri antara lain mencerminkan dampak tunda dari transmisi penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang masih berlanjut. Pada kelompok BUMN, penempatan dana Pemerintah (SAL) masih berkontribusi dalam mengurangi kebutuhan bank untuk menawarkan suku bunga deposito *special rate*, terutama dari golongan nasabah Korporasi, sehingga membantu meredakan persaingan suku bunga. Pada kelompok BUSN, pangsa CASA yang relatif besar dari deposito Korporasi dan Perseorangan sebesar 69,92% yoy turut mendorong perbaikan struktur pendanaan dengan biaya yang lebih rendah sehingga berdampak pada penurunan HPDK. Sementara itu, penurunan HPDK pada kelompok BPD dipengaruhi penurunan simpanan milik Pemerintah Daerah yang umumnya berbiaya tinggi, seiring kinerja kas daerah pada awal tahun 2026 yang belum optimal. Di sisi lain, kenaikan HPDK pada kelompok KCBA dipengaruhi oleh meningkatnya biaya dana dari kewajiban kepada bank lain.

Biaya OHC turun cukup signifikan, terutama dikontribusikan oleh penurunan pada kelompok BUMN dan BPD. Pada Januari 2026, OHC industri perbankan mengalami penurunan sebesar 31 bps menjadi 3,44%. Kontribusi penurunan terbesar berasal dari kelompok BUMN dan BPD yang mencatatkan penurunan masing-masing sebesar 53 bps dan 47 bps menjadi 3,69% dan 3,37% (**Grafik 5**). Penurunan juga terlihat pada kelompok BUSN namun lebih kecil, yaitu sebesar 5 bps menjadi 3,19%. Di sisi lain, kelompok KCBA tercatat mengalami peningkatan sebesar 11 bps menjadi 1,86%. Penurunan OHC pada hampir seluruh kelompok bank dipengaruhi oleh penurunan beban lainnya yang meliputi belanja barang dan jasa. Pada kelompok BUMN, penurunan OHC juga dipengaruhi oleh penurunan beban promosi dan iklan, sementara pada kelompok BPD dan BUSN penurunan OHC turut dipengaruhi oleh penurunan beban tenaga kerja. Sementara itu, kenaikan OHC pada kelompok KCBA dikontribusikan oleh peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan dan penyusutan/amortisasi aset yang dialokasikan kepada suku bunga kredit.

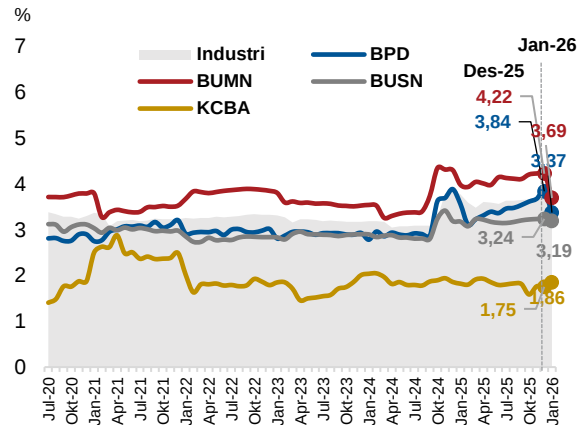
Margin keuntungan tercatat meningkat pada mayoritas kelompok bank, kecuali KCBA. Secara industri, kinerja profitabilitas perbankan mengalami perbaikan sebesar 27 bps menjadi 2,23% pada Januari 2026. Berdasarkan kelompok bank, kelompok BUMN dan BPD mengalami kenaikan margin masing-masing sebesar 43 bps dan 31 bps menjadi 2,45% dan 2,03% (**Grafik 6**). Kenaikan margin keuntungan pada kedua kelompok bank tersebut didukung oleh penurunan biaya dana dan efisiensi biaya operasional. Perkembangan serupa terjadi pada kelompok BUSN meskipun terpantau lebih rendah dari kelompok BUMN dan BPD, yaitu sebesar 6 bps menjadi 2,02%. Di sisi lain, kelompok KCBA mencatatkan penurunan margin keuntungan sebesar 13 bps menjadi 1,47%. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan kompensasi terhadap deposan inti bank sebagai upaya retensi dana. Secara keseluruhan, perbedaan perkembangan margin keuntungan antarkelompok bank mencerminkan strategi bisnis, struktur pendanaan, dan karakteristik basis nasabah masing-masing bank dalam merespon dinamika biaya dan risiko.

Grafik 4. Perkembangan HPDK* Berdasarkan Kelompok Bank (%)



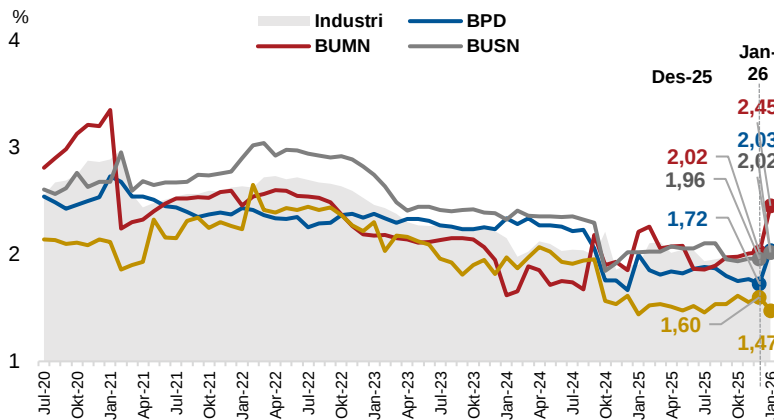
*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.
Sumber: OJK (diolah)

Grafik 5. Perkembangan OHC* Berdasarkan Kelompok Bank (%)



*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.
Sumber: OJK (diolah)

Grafik 6. Perkembangan Margin Keuntungan* Berdasarkan Kelompok Bank (%)



*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.
Sumber: OJK (diolah)

Perkembangan Suku Bunga Kredit

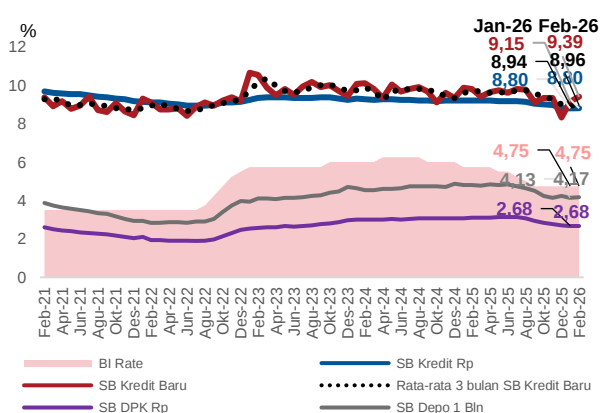
Suku bunga kredit Rupiah tercatat stabil pada Februari 2026, di tengah kenaikan suku bunga kredit baru.⁴ Rata-rata tertimbang suku bunga kredit Rupiah tercatat stabil secara bulanan, yaitu tetap pada level 8,80%, sementara suku bunga kredit baru meningkat 24 bps menjadi 9,39% (**Grafik 7**). Kenaikan suku bunga kredit baru mencerminkan respon terhadap persepsi risiko dan kondisi pasar terkini, sementara pembentukan suku bunga kredit Rupiah masih dipengaruhi penyesuaian harga kredit lama, sehingga penyesuaian suku bunga kredit baru belum sepenuhnya tecermin pada suku bunga kredit Rupiah. Sementara itu, kenaikan suku bunga kredit baru terjadi pada mayoritas kelompok bank, kecuali BUSN. Suku bunga kredit baru tercatat naik signifikan pada kelompok BPD dan BUMN masing-masing sebesar 84 bps dan 60 bps menjadi 9,03% dan 8,55% (**Grafik 8**). Sementara itu, kenaikan yang lebih terbatas terjadi pada kelompok KCBA sebesar 22 bps menjadi 8,08%. Di sisi lain, kelompok BUSN mencatatkan penurunan suku bunga kredit baru sebesar 32 bps menjadi 9,99%. Kenaikan suku bunga kredit baru turut dipengaruhi oleh penyesuaian persepsi bank terhadap peningkatan risiko kredit debitur pada Februari 2026, seiring dengan penurunan kualitas kredit yang mendorong kenaikan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Dinamika ini mengindikasikan pergerakan

⁴ Suku bunga kredit baru adalah tingkat harga yang ditetapkan oleh bank selaku kreditur atas fasilitas kredit baru kepada debitur.

suku bunga kredit baru cenderung bersifat lebih sensitif terhadap perubahan persepsi risiko dan komposisi pencairan kredit dibandingkan dengan penurunan biaya dana yang masih berlanjut.

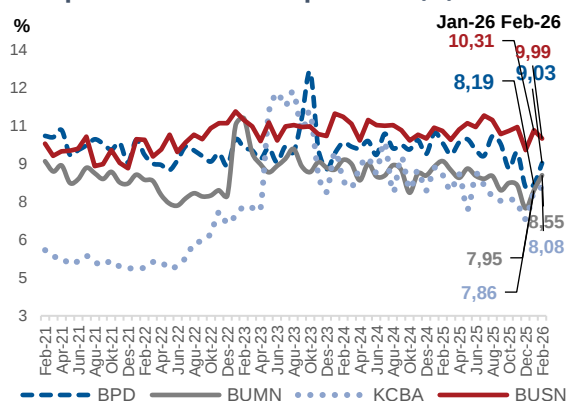
Dari sisi penghimpunan dana, suku bunga DPK Rupiah terpantau stabil yang mengindikasikan upaya bank untuk menjaga likuiditas. Suku bunga DPK Rupiah terpantau stabil sebesar 2,68% pada Februari 2026, antara lain mencerminkan upaya bank untuk mempertahankan depositnya. **(Grafik 7).** Suku bunga DPK dalam satu bulan terakhir yang cenderung stabil turut dipengaruhi oleh stabilnya pangsa dan suku bunga setiap jenis simpanan DPK. Ke depan, sinergi dan strategi operasi moneter dalam mendukung likuiditas perbankan serta penempatan dana Pemerintah di perbankan diperkirakan masih akan berkontribusi terhadap perbaikan struktur pendanaan dan meredakan persaingan suku bunga dana. Kondisi ini terjadi di tengah ketidakpastian geopolitik yang masih tinggi, sehingga bank berupaya untuk menjaga kecukupan likuiditasnya.

Grafik 7. Perkembangan Suku Bunga Kredit Rp dan Suku Bunga DPK Rp (%)



Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Grafik 8. Perkembangan Suku Bunga Kredit Baru Rp Berdasarkan Kelompok Bank (%)

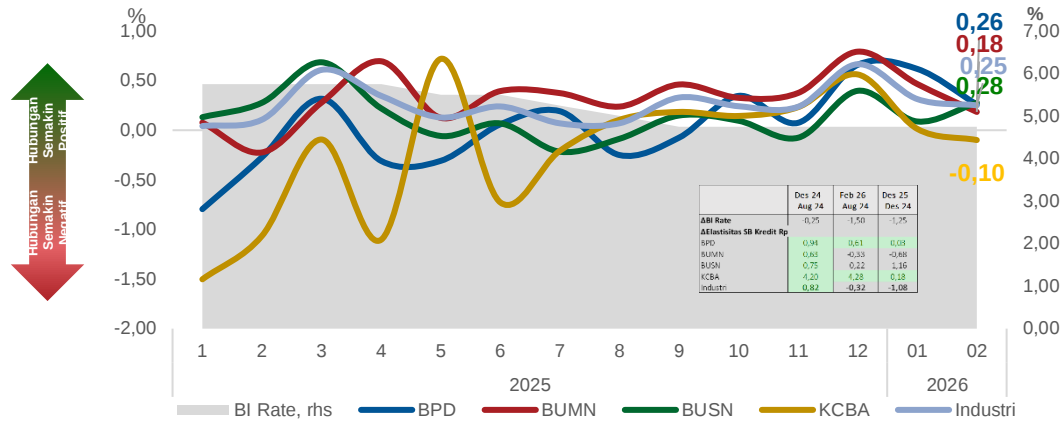


Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Perkembangan Elastisitas Suku Bunga Kredit Baru Sejak Agustus 2024

Elastisitas suku bunga kredit baru terhadap suku bunga kebijakan tercatat menurun pada Februari 2026. Secara bulanan, transmisi suku bunga kebijakan kepada suku bunga kredit baru menunjukkan penyesuaian yang lebih terbatas, tecermin dari penurunan koefisien elastisitas secara industri sebesar 6 bps menjadi 0,25 pada Februari 2026 **(Grafik 9).** Koefisien ini mencerminkan sensitivitas perubahan suku bunga kredit baru terhadap perubahan suku bunga kebijakan dalam jangka pendek. Meskipun demikian, secara tren, koefisien elastisitas industri masih menunjukkan penguatan dibandingkan periode Februari 2025 yang berada di level 0,11, mencerminkan perbaikan transmisi selama satu tahun terakhir. Berdasarkan kelompok bank, kecepatan dan besaran respons tercatat beragam. Pada Februari 2026, penurunan koefisien elastisitas kelompok BPD dipengaruhi oleh pertumbuhan realisasi kredit konsumsi (KK) dengan rigiditas suku bunga lebih tinggi dibandingkan kredit produktif. Pola serupa juga terlihat pada kelompok BUMN, di mana KK menjadi segmen kredit yang tumbuh positif secara bulanan dibandingkan segmen lainnya. Sementara itu, penurunan elastisitas kelompok KCBA dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga kredit investasi (KI). Di sisi lain, penguatan respon ditunjukkan oleh kelompok BUSN yang didukung realisasi kredit modal kerja (KMK) dengan suku bunga yang relatif lebih kompetitif.

Grafik 9. Elastisitas Suku Bunga Kredit Baru Rupiah Berdasarkan Kelompok Bank (%)



Keterangan:

- Elastisitas dihitung dengan rumus sebagai berikut = (% Perubahan SB Kredit Baru Rp) / (% Perubahan BI Rate)
- Periode dasar yang dipakai saat menghitung elastisitas adalah Agustus 2024, yakni awal periode penurunan BI Rate.

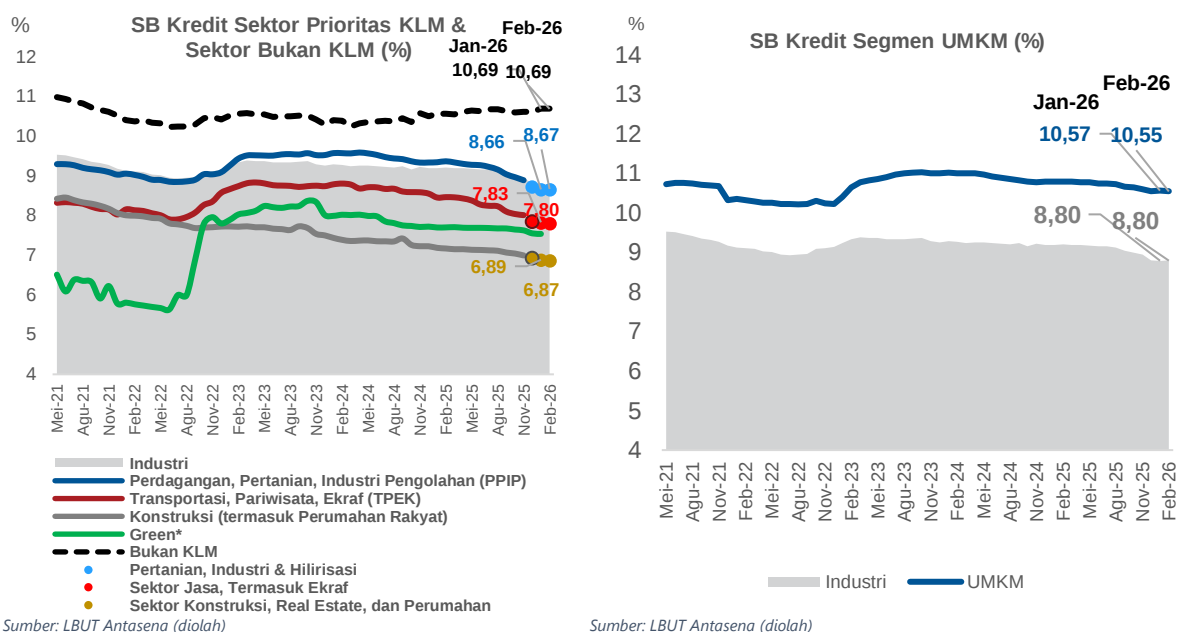
Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Suku Bunga Kredit Sektor Prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)⁵

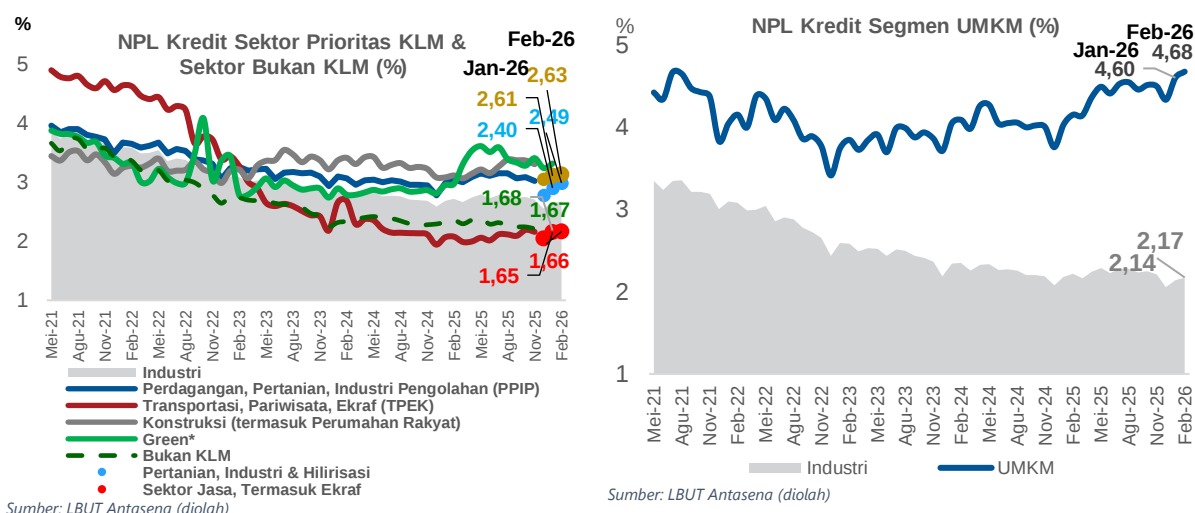
Kebijakan pemberian insentif berbasis kinerja dan orientasi ke depan (KLM *Forward Looking*) berkontribusi pada penurunan suku bunga kredit mayoritas sektor prioritas yang lebih kompetitif, didukung penguatan likuiditas dan penurunan biaya dana bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas KLM. Kondisi ini mengindikasikan transmisi penurunan suku bunga kebijakan terhadap sektor prioritas KLM sejalan dengan persepsi risiko perbankan yang relatif terjaga terhadap kualitas debitur pada sektor tersebut. Pada Februari 2026, suku bunga kredit seluruh sektor prioritas KLM tercatat lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri serta mengalami penurunan secara bulanan (**Grafik 10**). Berdasarkan kelompok sektor prioritas KLM, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif mengalami penurunan sebesar 3 bps menjadi 7,80% yang didukung oleh penurunan suku bunga kredit pada sektor Jasa Dunia Usaha dan Jasa Sosial. Sementara itu, sektor Kontruksi, *Real Estate*, dan Perumahan turut mengalami penurunan sebesar 2 bps menjadi 6,87% yang ditopang oleh penurunan pada sektor pendukung antara lain Jasa Dunia Usaha dan Jasa Lainnya. Di sisi lain, sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Hilirisasi tercatat relatif stabil dengan adanya kenaikan suku bunga kredit sebesar 1 bps menjadi 8,67% yang dipengaruhi kenaikan pada sektor pendukung Listrik, Gas, dan Air (LGA). Penyaluran insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp427,5 triliun hingga Februari 2026 turut mendukung efektivitas transmisi suku bunga kebijakan serta akselerasi pembiayaan yang optimal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perkembangan suku bunga kredit pada sektor prioritas KLM terjadi di tengah kenaikan terbatas rasio kredit bermasalah, meskipun masih terjaga pada level yang relatif rendah dengan rasio NPL seluruh sektor prioritas berada di bawah 5% (**Grafik 11**). Di sisi lain, segmen UMKM tercatat mengalami penurunan suku bunga kredit sebesar 2 bps secara bulanan menjadi 10,55%, di tengah kenaikan rasio NPL sebesar 8 bps menjadi 4,68% pada Februari 2026.

⁵ Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) merupakan insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan melalui pengurangan kewajiban giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata. Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Sejak 1 Desember 2025, terdapat reklasifikasi sektor prioritas yang ditetapkan untuk memperkuat KLM antara lain: sektor Pertanian, Industri & Hilirisasi, sektor Jasa, termasuk Ekonomi Kreatif (Ekraf), sektor Konstruksi, *Real Estate*, dan Perumahan. Selain sektor prioritas di atas, kebijakan KLM juga menyasar segmen UMKM dan Usaha Mikro (UMi).

Grafik 10. Perkembangan Suku Bunga Kredit Pada Sektor Prioritas KLM dan Segmen UMKM



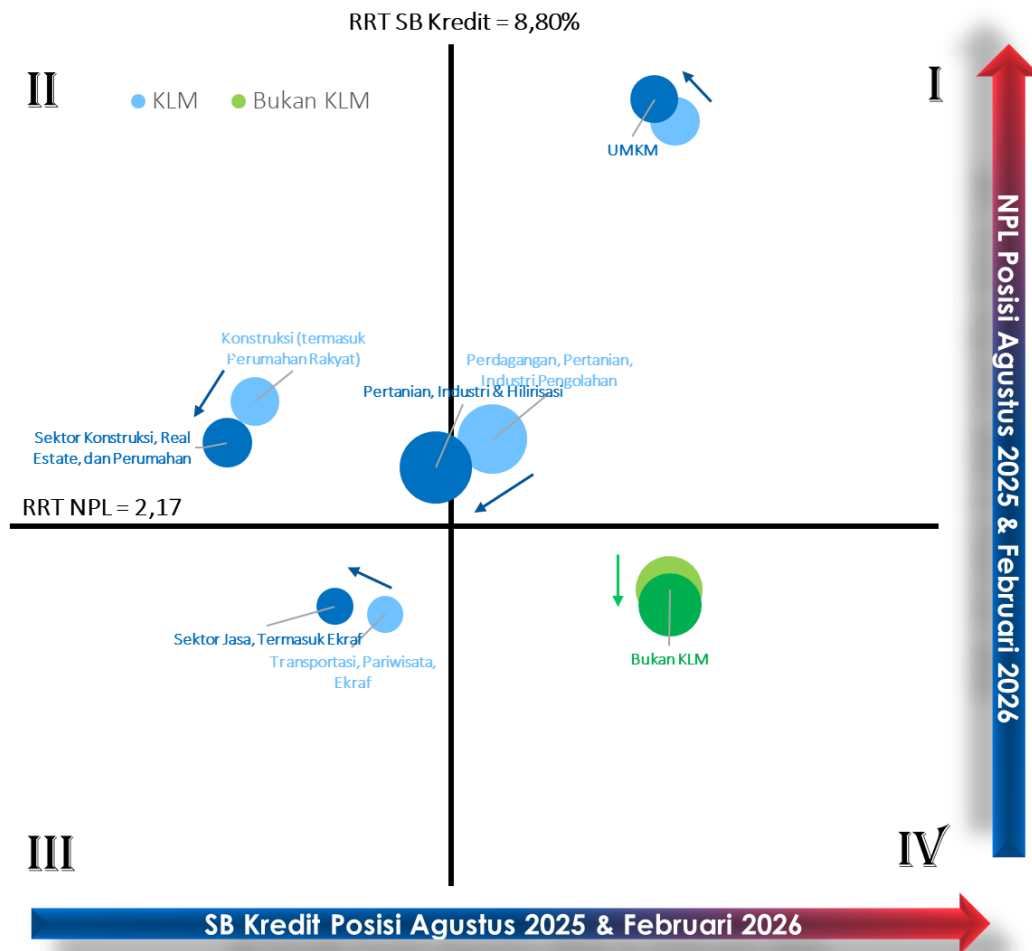
Grafik 11. NPL Kredit Sektor Prioritas KLM dan Segmen UMKM



Dalam perspektif waktu yang lebih panjang yaitu enam bulan terakhir, suku bunga kredit pada seluruh sektor prioritas KLM tercatat mengalami penurunan. Reklasifikasi sektor prioritas melalui penyaluran KLM *Forward Looking* mendukung prospek permintaan kredit yang lebih baik dari sektor prioritas KLM sehingga menopang pertumbuhan kredit lebih lanjut. Penurunan suku bunga kredit tersebut menempatkan sektor prioritas KLM pada kuadran II dan III (**Grafik 12**), yang mencerminkan kombinasi penurunan suku bunga dengan risiko yang relatif terjaga, meskipun terdapat indikasi peningkatan terbatas pada beberapa sektor KLM. Secara agregat, suku bunga kredit sektor prioritas KLM lebih rendah dibandingkan rata-rata suku bunga kredit industri perbankan, mengindikasikan kebijakan KLM dapat memperkuat transmisi penurunan suku bunga kebijakan dan meningkatkan intermediasi perbankan. Namun demikian, tekanan risiko kredit terpantau meningkat pada sektor Jasa, termasuk Ekonomi Kreatif, setelah terdapat penyesuaian klasifikasi sektor KLM, sehingga perlu dimonitor secara berkelanjutan. Di sisi lain, suku bunga kredit sektor non-KLM mengalami penurunan terbatas sebesar 1 bps menjadi 10,69%, sejalan dengan perbaikan kualitas kredit yang tercermin pada penurunan rasio NPL sebesar 9 bps menjadi 1,67% (kuadran IV). Sementara itu, suku bunga kredit UMKM mengalami penurunan di tengah peningkatan risiko kredit. Hal ini mengindikasikan upaya bank

dalam mendukung inklusivitas dengan tetap menjaga pengelolaan kualitas kredit, sesuai dengan karakteristik dan profil risiko debitur.

Grafik 12. Kuadran Pemetaan Suku Bunga dan NPL Sektor dan Segmen Prioritas KLM



Kuadran I: suku bunga tinggi, NPL tinggi

Kuadran II: suku bunga rendah, NPL tinggi

Kuadran III: suku bunga rendah, NPL rendah

Kuadran IV: suku bunga tinggi, NPL rendah

Keterangan:

Ukuran bubbles menunjukkan pangsa kredit.

Arah panah pada bubbles menunjukkan pergerakan dari Agustus 2025 ke Februari 2026

Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Tujuan dari transparansi asesmen SBDK adalah untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter dan juga mendukung kebijakan makroprudensial Bank Indonesia. Melalui transparansi, masyarakat dan dunia usaha dapat memperoleh informasi terkait dengan perkembangan suku bunga dasar kredit perbankan dan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh perbankan. Transmisi suku bunga kebijakan yang lebih baik ke suku bunga kredit dengan penetapan suku bunga kredit yang kompetitif dan efisien, diharapkan dapat menopang permintaan kredit dalam rangka mendukung perekonomian.

Sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia (BI) menyusun publikasi “Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan kepada Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan.” Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pembentukan suku bunga dasar kredit masing-masing bank yang cenderung bersifat spesifik untuk setiap bank, antara lain Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), biaya *overhead* (OHC), dan margin keuntungan. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada publik mengenai gambaran atas suku bunga dasar kredit perbankan Indonesia, termasuk informasi mengenai pemetaan suku bunga dasar kredit tersebut. Melalui publikasi asesmen ini, disamping mendorong transmisi kebijakan moneter, BI juga berupaya untuk memperluas diseminasi informasi kepada masyarakat baik korporasi maupun rumah tangga. Selain itu, publikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, disiplin pasar, dan kompetisi dalam pembentukan suku bunga dasar kredit perbankan sehingga suku bunga dasar kredit yang ditawarkan dapat lebih kompetitif dalam mendorong permintaan kredit dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Publikasi SBDK ini merupakan salah satu praktik di dunia internasional. Bank sentral negara lain seperti di Malaysia, India, dan Tiongkok juga memiliki kebijakan transparansi suku bunga kredit melalui publikasi *External Benchmark Rate*, *Loan Prime Rate*, dan *Base Rate*. Sementara itu IMF juga meminta setiap negara anggota untuk menyampaikan *Reference Lending Rate* dan *Reference Deposit Rate* untuk dipublikasikan sebagai selisih referensi suku bunga pinjaman terhadap suku bunga simpanan, yang merupakan salah satu *Financial Soundness Indicator* (FSI).